Bali Post

"Dwelling Time" Terjadi di Bali

Perlu Uang Pelicin, Harga Jual Barang Jadi Naik

BPM/edi

KAPAL PESIAR - *Kapal pesiar yang sering bersandar di Pelabuhan Benoa.*

Kasus lamanya waktu bongkar muat peti kemas (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, juga terjadi di sejumlah pelabuhan di Bali.

KONDISI yang lama telah terjadi ini turut mengerek harga jual barang yang didatangkan dari luar akibat beban bongkar muat yang mesti ditanggung pengusaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Bali, Panudiana Kuhn, mengatakan, *dwelling time* merupakan kasus lama yang menjadi sarang korupsi, hanya saja baru kali ini terungkap setelah Presiden Jokowi menggelar sidak.

"*Dwelling time* sampai lima hingga enam hari ini adalah omong kosong, seharusnya hanya sehari, seperti di Singapura. Ini memang yang menghambat, tapi di mana-mana memang begitu, termasuk di Bali," keluh Kuhn.

Lamanya waktu bongkar muat barang di pelabuhan, diakui Kuhn akibat perizinan yang

Edisi : Minggu, 9 Agustus 2015

Hal : 1

Bali Post

sambungan - - -

bertele-tele dan tidak ada kepastian. Bahkan, dia menyebutkan jika perilaku menghambat pengusaha juga dilakukan di Bea Cukai. "Hanya, pengusaha tidak ada yang berani ngomong itu. Ini jelas memengaruhi *cost* operasional, tapi juga harga jual barang," katanya.

Menurutnya, setelah barang sampai di pelabuhan pengusaha harus membayar sewa gudang, karena barang yang didatangkan tidak kelar dibongkar selama sehari, belum lagi biaya bongkar barangnya. "Itu per kilogram berapa, per kontainer berapa, di airport sini (Bali –red) juga sama. Kalau kita impor, beras, mesin, daging segar, dan buah maunya pengusaha secepatnya agar bisa secepatnya dijual ke pasar," terangnya.

Terhambat di pelabuhan maupun di bandara, biaya yang dikeluarkan membengkak, sehingga harga jual barang pun jauh meningkat dari harga semestinya. "Kalau mau cepat ya ... memang harus menggunakan uang pelicin, semuanya hitung-hitungannya duit. Jadi jangan salahkan pengusaha jika harga barang jadi mahal," tegasnya.

Hal. 19
Biaya Tinggi

Biaya Tinggi

Dari Hal. 1

Dia juga mengeluhkan, tingginya biaya masuk barang (impor) ke Indonesia, termasuk Bali. Seperti halnya mikol yang dikenakan hingga 400 persen, sehingga pengusaha berusaha mendekati petugas.

Kuhn mengaku mendukung kebijakan pemerintah pusat menata tata niaga perdagangan, khususnya ekspor dan impor yang memanfaatkan transportasi laut dan udara. "Barang yang dikirimnya sudah lama, dibongkarnya juga lama ditambah biaya masuknya tinggi tentunya memengaruhi harga, karena itu saya dukung langkah pemerintah," tegasnya.

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali juga meminta pemerintah tidak diam dan berpangku tangga melihat kejadian tersebut. "Hal ini menurut saya harus baik dan transparan, teknologi tidak cukup memberi pelayanan, artinya walau sudah disediakan teknologi canggih pun jika proses ada korupsi, jelas konsumen yang akan dirugikan," terang Ketua YLPK Bali, Putu Armaya.

Menurutnya, saatnya bongkar peti kemas buat aturan khusus yang lebih cepat dan berdampak ke konsumen. "Jika tidak negara kita akan tersisih dan konsumen kita menanggung pilu yang sangat pahit, revolusi mental saatnya memperbaiki semua lini pelayanan," tegasnya.

Dia juga menegaskan, perbuatan merugikan konsumen dan melanggar Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi yang cukup berat. Dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. **(par)**

2

Edisi : Minggu, 9 Agustus 2015

Hal : 1 dan 19

Bali Post

Lima Desa Dilanda Kekeringan

Pemkab Buleleng Siapkan Embung Penampungan Air

Singaraja (Bali Post) -

Kondisi kekeringan mulai melanda sebagian wilayah di Kabupaten Buleleng. Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. bahkan telah melakukan antisipasi kekeringan dengan membentuk embung penampungan air di lima desa. Rencananya embung akan difungsikan sebagai sumber air cadangan, khususnya menghadapi musim kering dalam jangka waktu panjang.

Wabup Sutjidra mengatakan, situasi kekeringan kerap kali melanda Buleleng setiap tahunnya. Ia telah melihat situasi di lapangan, dan berkordinasi meminimalisasi kekeringan dengan memberdayakan masyarakat melalui pembentukan embung di setiap desa dilanda kekeringan. "Masalah kekeringan di Buleleng terjadi setiap tahun, hanya saja kami menilai air di Buleleng banyak terbuang ke laut. Ini diduga karena jarak antara gunung dan laut cukup dekat," ujar Sutjidra.

Pihaknya baru mendata lima desa mengalami kekeringan di wilayah dengan ketinggian tertentu. Lima desa tahun ini akan dibangun sebuah embung penampungan air. "Usaha yang kami lakukan bersama Bupati Buleleng, dengan berkoordinasi bersama petugas terkait. Kami tengah membuat embung di Desa Bulian, yang bisa mengairi di lima desa, baik Desa Kubutambahan, Bulian, Pacung, Julah dan Bondalem," paparnya.

Ditegaskan Sutjidra, kordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, dan PDAM Buleleng, jauh-jauh hari telah dilakukan Pemkab Buleleng. Apabila pembangunan embung penampungan air tahun depan tidak terdapat kendala, ia memastikan embung sudah dapat dipergunakan secara massal. "Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa difungsikan. Jadi untuk keadaan darurat kami sudah memikirkan, dan meminta BPBD Buleleng supaya menyiapkan tangki-tangki air bersih, dibantu PDAM yang mendistribusikan air bersih secara rutin," tegasnya. **(kmb34)**

Edisi : Minggu, 9 Agustus 2015

Hal : 3

Bali Post

PADAT - *Padatnya aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Benoa belum memberi kontribusi bagi Pemkot Denpasar.*

BPM/edi

Nihil, Kontribusi Pelindo Benoa ke Pemkot

Sejak dulu krama Bali mengeluh tak mendapat apa-apa dari badan otoritas yang mengelola sejumlah pelabuhan di Bali. Pemimpin dan Pemrov Bali tak berani berjuang untuk mendapatkan "kue" pelabuhan.

OTORITAS yang dimiliki pengelola pelabuhan dalam mengelola wilayahnya, ternyata berdampak buruk bagi pemerintah daerah. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di lingkungan pelabuhan akhirnya tidak tergarap maksimal. Seperti yang dialami Pemkot Denpasar terhadap keberadaan Pelabuhan Benoa. Sejumlah potensi PAD yang semestinya bisa ditindaklanjuti oleh Pemkot, belum tergarap maksimal.

Ketua Komisi II DPRD Denpasar Eko Supriadi dan anggotanya A.A. Susruta Ngurah Putra mengatakan potensi yang ada di Pelabuhan Benoa yang bisa dipungut retribusinya di antaranya IMB, PBB, serta pajak reklame. Sayangnya, sampai saat ini, potensi itu belum tergarap maksimal.

Eko melihat tingginya potensi ini berharap Pemkot Denpasar melakukan penjajakan untuk bisa mendapatkan retribusi dari bidang-bidang tertentu yang memungkinkan sesuai dengan peraturan yang ada. Eko mengakui beberapa kontribusi yang diharapkan bisa dipungut belum bisa dilakukan. Padahal, sudah ada beberapa SKPD di Pemkot Denpasar sudah melakukan MoU dengan pihak Pelindo. Namun, sampai MoU itu habis masa berlakunya, kontribusinya nihil alias belum ada.

Sejatinya, dengan adanya UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP No. 61 tahun 2009 tentang Pelabuhan dan KEPMENHUB No. KP 88 tahun 2011 tertanggal 14 Februari 2011, Pemkot memungkinkan untuk membentuk BUMD, khusus pelabuhan atau BUP. BUP akan melakukan usaha di bidang pelabuhan dan pelayaran yang bidang pokok kegiatannya adalah untuk melancarkan arus kapal,arus barang, dan jasa. **(ara)**

Edisi : Minggu, 9 Agustus 2015

Hal : 1

Bali Post

Terganjal Jalan Memutar

PELABUHAN Celukan Bawang dan sekitarnya kini menjadi daerah industri di Bali Utara. Kawasan ini memiliki potensi menjanjikan khususnya terhadap akses bongkar muat barang.

Pelabuhan Celukan Bawang sebagai pelabuhan alami, turut diminati sebagai lokasi bersandarnya kapal-kapal pesiar dari berbagai belahan dunia. Namun, di dalam perjalanannya, pembangunan fasilitas penunjang sangat diperlukan untuk memberi akses kemudahan bongkar muat barang untuk keperluan beberapa tahun mendatang.

Menurut *General Manager* PT Pelindo III Cabang Celukan Bawang, Dewa Gede Adi Kumarajaya, ke depan, keperluan kargo akan mengalami peningkatan khususnya terhadap pasokan semen dari luar daerah ke Bali.

Hal. 19
Perlu Gudang

Perlu Gudang

Dari Hal. 1

Ia telah mempersiapkan infrastruktur gudang penyangga, dengan tujuan mempercepat aktivitas bongkar muat barang di dermaga. "Gudang penyangga sangat diperlukan untuk mempercepat bongkar muat barang di Pelabuhan Celukan Bawang," ujarnya.

Hanya, lajur distribusi bongkar muat di Pelabuhan Celukan Bawang diganjal oleh infrastruktur jalan menuju Kota Denpasar.

Sopir truk seberat 30 ton harus mengambil jalan memutar, dari arah Pelabuhan Celukan Bawang melintasi Gilimanuk, Negara, Tabanan, Badung, dan baru ke Denpasar. "Nah jelas akibatnya truk tidak bisa mengirim barang dalam waktu satu hari, kalaupun dipaksa berjalan akan tiba sampai malam hari. Itu kendala kita di akses, maka itu sangatlah diperlukan gudang penampung itu sebagai skala prioritas," kata Adi Kumarajaya.

Tercatatat data bongkar muat di Pelabuhan Celukan Bawang dari Januari hingga Juli 2015 sebanyak 171 kapal. Arus barang sejenis pupuk, semen mencapai 440,362 ton. Jenis kayu log atau olahan mencapai 2,603 M3, dan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 105 ton. Arus peti kemas tercatat nihil, dan terakhir arus penumpang dalam negeri atau luar negeri memakai jasa kapal *cruise* sebanyak 1.087 orang. **(dgk)**

Edisi : Minggu, 9 Agustus 2015
Hal : 1 dan 19